

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang APBN 2021.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.*

Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. *Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.*

Kementerian Dalam Negeri. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan.*

Kementerian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.*

Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.*

Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor*

17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Kemendes PDPT. (2020). *Permendes Nomor 13 Tahun 2020. Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.*

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3 Tahun 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.*

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. (2020). *Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 74 Tahun 2020. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021.*

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. (2020). *Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 84 Tahun 2020. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2021.*

Pemerintah Desa Danasari. (2020). *Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Danasari Tahun 2021.*

Pemerintah Desa Danasari. (2020). *Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Danasari.*

2. Sumber Lainnya

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Buku Saku Dana Desa.* Jakarta: Tim Penyusun.

Kementerian Keuangan. (2021, Maret 26). *Ini Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.* Retrieved Desember 9, 2021, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021/>

Pemerintah Desa Danasari. (2017, Juli 25). *Profil Desa Danasari.* Retrieved Desember 9, 2021, from Website Desa Danasari: <https://danasari-pematang.jaya.go.id/>

Shuha Khalida. (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa.* Padang: Universitas Negeri Padang.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua.* READ.